



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LALU FIRMAN WIJAYA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **515682**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.735.190.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , Rp. 1.100.000.000
2. Tanah Seluas 247 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, Rp. 125.000.000
6. Tanah Seluas 5.673 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 170.190.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 210.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 111.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 507.966.123**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.564.656.123

III. HUTANG

Rp. 151.151.453

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.413.504.670

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.